

## Asset Masih Bermasalah, Desak Panggil Sekda

Pontianak. BERKAT.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar 2011 masih bertahan pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari laporan tahun sebelumnya. Masalah asset masih menjadi catatan penting bagi BPK RI, sistem pencatatan, pelaporan dan pengamanan asset tetap belum memadai. "Kita mengapresiasi kemajuan pada tata kelola keuangan Pemprov Kalbar, seperti realisasi anggaran terjadi surplus hingga tiga kali lipat menjadi Rp206,9 miliar. Tapi karena masih ada persoalan asset yang belum terselesaikan, penilaian masih bertahan pada WDP. Kita minta Sekda segera dipanggil," tegas HM Ali Akbar AS SH, Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, Kamis (5/7).

Oponi BPK itu, sambung dia, salah satunya karena pencatatan, pelaporan dan pengamanan aset tetap pada Pemprov Kalbar belum memadai. Hal ini terjadi pada asset tetap tanah sebesar Rp92,2 miliar. Asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2,8 miliar. Asset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp380,9 miliar. Kemudian, Ali Akbar melanjutkan, juga terjadi pada asset tetap lainnya sebesar Rp 5,2 miliar.

Untuk asset tetap tanah tersebut termasuk di dalamnya tanah yang belum bersertifikat dan asset tanah bersertifikat tidak atas nama Pemprov Kalbar minimal seluas 87.302.153,26 m2 senilai Rp53,2 miliar. Asset tetap yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp1,7 milyar dan

digunakan pihak lain tanpa izin senilai Rp 908 juta. "Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan masih terdapat kesalahan penganggaran belanja. Kesalahan penganggaran terjadi pada belanja modal yang digunakan untuk pembelian asset yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada pihak lain sebesar Rp63,6 miliar," ungkap politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini.

Kalbar, kata Ali Akbar, bisa mengejar opini WTP. Itu jika pemerintah provinsi serius mendorong perbaikan tata kelola keuangan Pemerintah dan segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang telah BPK RI sampaikan dalam LHP, terutama soal aset. "Kita juga sesalkan kinerja Sekda seperti ini, tidak cepat dalam

menindaklanjuti rekomendasi yang ada melalui SKPD yang ada," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan M Jimmy menambahkan, persoalan penataan asset itu murni tugasnya Sekda. Karena itu, diminta kepada Pimpinan DPRD untuk memanggil Sekda guna menyelesaikan persoalan asset tersebut. "Itupun kalau kita sama-sama punya niat untuk mengejar WTP pada tahun anggaran 2012 nanti. Soal Pansus, kalau itu urgen dan penting, memang uang negara itu dipergunakan untuk mengurus sesuatu yang penting, tidak masalah sebesar apapun anggaran yang dibutuhkan. Tapi sekarang ini, Pansus itu belum urgen untuk dibentuk," jelasnya. (aca)